

Government Must Maintain Investment Climate in Indonesia

Contributed by Maizer
Tuesday, 05 June 2018

Issues based on technology or industry 4.0, the potential to generate a number of positive and negative impacts in terms of business climate in Indonesia.

Indonesia needs to think about ways to keep investors investing in Indonesia. Investments become a mainstay to keep spur economic growth and create jobs. Invesatu be a crucial point in the middle of the potential of 50 million people in Indonesia will lose their jobs because of industrial revolution 4.0. Eka Sastra, Member of DPR-RI said, related to industry 4.0, the production process is using big data. This mechanism distinguishes industry 4.0 with industry in the foregoing. "The question of industrial revolution 4.0 is not a matter of getting ready or not but how we are involved in it," he said in a discussion of Political Economy Discussion Forum (FDEP) entitled Keeping Indonesia's Investment Sustainability. In the same discussion, economic observer from UGM, Tony Prasertiantiono, said that the government has prepared five industrial sectors to be confronted with the 4.0 industrial revolution. The sectors are food and beverages, textiles, automotive, electronics, and chemicals. While other industries outside the five sectors will still contribute to the Indonesian economy, both as a contributor to state revenues, as well as absorbing the workforce. The UGM economist further stated that one of Indonesia's efforts to stabilize the rupiah is to rely on exports and investment.

Factors that are interrelated because for export industry and industry activities are needed very closely related to investment. "The government is working hard to attract as much investment as possible," he said. But contrary to that, the fact in the country shows some investors actually feel uncomfortable. The main reason is the existence of certain regulations that lead to increased production costs. Regulations that emerge one of them dilatarbelakangi by the need for government to increase state revenues, then realized by raising tax rates, duties, excise, and levy. This official levy causes industry actors in a dilemmatic condition, where they are forced to withhold production to avoid increased costs. Increased production capacity will drive business activity from turning profit into a trigger. The increase in production means an increase in the amount of taxes, duties, taxes, and fees to be paid. This is confirmed by Toni Tanduk of the Indonesian Salt Users Industry Association. "If Indonesia wants to invite other parties to invest, it should be taken into account how to maintain the sustainability of that investment in Indonesia". Similarly, Toni Prasertiantiono added the importance of facing investment competition with other countries, especially in Southeast Asia "Support to existing investment in Indonesia is important, for example by building infrastructure and making regulations that support production activities", he added. Industries may reduce production capacity to prevent losses. In that scenario, the state and the workers will eventually lose money. Therefore, the state and workers lose the potential income. The state also suffers from losses due to the industry holding back or even cutting production. If this condition continues, investors will choose to leave to other countries that are more supportive of its capital development. The scenario is not good for Indonesia who are working hard to attract as much investment as possible. Potential investors is not impossible to remove Indonesia from the list of candidates for investment location, when the facts appear, it turns out that many investors in Indonesia instead move the business to another country. In the discussion of FDEP, Eka Sastra also gave examples from the tobacco industry. He said the regulations related to gray tobacco, could be the main cause of investors in this industry are reluctant to maintain business in Indonesia. The inj condition has a crucial impact, as it was known in 2017 that the tobacco sector contributed Rp 149 trillion or 10 percent of the APBD's revenue target. The sector also employs a total of 6.4 million people comprising of sharecroppers, clove farmers, factory workers, and workers in the tobacco product distribution sector

Pemerintah Harus Menjaga Iklim Investasi di Indonesia

Isu investasi berbasis teknologi atau industri 4.0, potensi menimbulkan menimbulkan sejumlah dampak positif maupun negatif dari segi iklim bisnis di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan cara agar investor tetap berinvestasi di Indonesia. Investasi menjadi andalan untuk tetap memacu pertumbuhan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Invesatu menjadi poin krusial di tengah potensi 50 juta orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaan karena revolusi industri 4.0. Eka Sastra, Anggota DPR-RI mengatakan, terkait industri 4.0, proses produksi sudah menggunakan big data. Mekanisme ini membedakan industri 4.0 dengan industri pada terdahulu. "Soal revolusi industri 4.0 ini bukan soal siap atau tidak tapi bagaimana kita terlibat di dalamnya"; ujarnya dalam diskusi Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) bertajuk Menjaga Kelangsungan Investasi Indonesia. Dalam diskusi yang sama, pengamat ekonomi dari UGM Tony Prasertiantiono menyampaikan pemerintah sejauh ini sudah menyiapkan lima sektor industri untuk dihadapkan pada revolusi industri 4.0. Sektor itu adalah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Sedangkan industri lainnya diluar ke-5 sektor tersebut tetap akan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang pendapatan negara, serta penyerap tenaga kerja. Ekonom UGM tersebut lebih lanjut menyampaikan, salah satu upaya Indonesia untuk stabilitas rupiah salah satunya adalah dengan mengandalkan ekspor dan investasi. Faktor-faktor itu saling berkaitan sebab untuk ekspor diperlukan kegiatan industri dan industri amat erat berkaitan dengan investasi. "Pemerintah sudah bekerja keras untuk menarik investasi sebanyak mungkin," ujar dia. Namun berkebalikan dengan hal tersebut, fakta di dalam negeri menunjukkan sejumlah investor justru merasa tidak nyaman. Alasan utamanya adalah adanya regulasi-regulasi tertentu yang berujung peningkatan biaya produksi. Regulasi yang muncul salah satunya dilatarbelakangi oleh perlunya pemerintah meningkatkan pendapatan negara, kemudian direalisasikan dengan menaikkan tarif pajak, bea, cukai, dan retribusi. Retribusi resmi ini menyebabkan para pelaku industri dalam kondisi dilematis, dimana mereka terpaksa menahan produksi untuk menghindari peningkatan biaya. Peningkatan kapasitas produksi akan mengarahkan aktivitas usaha berbalik dari menghasilkan keuntungan menjadi pemicu kerugian Sebab, peningkatan produksi berarti peningkatan jumlah pajak, bea, cukai, dan retribusi yang harus dibayar. Hal ini dibenarkan oleh Toni Tanduk dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. "Jika Indonesia ingin mengajak pihak lain untuk berinvestasi, perlu diperhitungkan bagaimana menjaga keberlangsungan

investasi itu di Indonesia”;. Senada deng, Toni Prasetiantiono menambahkan pentingnya menghadapi persaingan investasi dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara “Dukungan terhadap investasi yang sudah ada di Indonesia menjadi penting, misalnya dengan membangun infrastruktur dan membuat regulasi-regulasi yang menunjang kegiatan produksi”;, tambahnya. Industri bisa saja mengurangi kapasitas produksi untuk mencegah kerugian. Dalam skenario itu, negara dan pekerja akhirnya akan ikut merugi. Sebab, negara dan pekerja kehilangan potensi pendapatan. Negara juga merugi karena lapangan kerja gagal tercipta akibat industri menahan atau bahkan memangkas produksi. Bila kondisi ini berlanjut, investor akan memilih hengkang ke negara lain yang lebih mendukung pengembangan modalnya. Skenario itu tidak bagus untuk Indonesia yang tengah bekerja keras menarik investasi sebanyak mungkin. Calon investor bukan tidak mungkin menghapus Indonesia dari daftar calon lokasi penanaman modal, bila muncul fakta, ternyata banyak investor di Indonesia malah justru memindahkan usaha ke negara lain. Dalam diskusi FDEP, Eka Sastra turut memberi contoh dari industri tembakau. Dia mengatakan regulasi terkait tembakau abu-abu, bisa menjadi penyebab utama investor di industri ini enggan mempertahankan bisnis di Indonesia. Kondisi inj memberi dampak krusial, seperti diketahui pada tahun 2017 sektor tembakau menyumbangkan Rp 149 triliun atau 10 persen dari target pendapatan APBD. Sektor itu juga mempekerjakan total 6,4 juta orang yang terdiri dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik, hingga pekerja di sektor distribusi produk tembakau